

**IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) DESA PETIR**  
(Science and Technology for People in the Petir Village)

**I Made Sumertajaya<sup>1)</sup>, Agus M. Soleh<sup>1)</sup>, Utami Dyah Safitri<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Dep. Statistika, Fakultas Matematika dan IPA IPB

**ABSTRAK**

Data kependudukan merupakan salah satu pilar keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah. Untuk menjamin terbangunnya system informasi kependudukan yang baik harus didukung oleh basis data penduduk yang akurat, tersedianya sarana prasarana pembaharuan data yang efektif dan efisien, sumber daya manusia aparat yang memadai dan tersedianya alokasi dana yang layak. Kegiatan pendataan di Desa Petir telah berhasil membangun basis data kependudukan Desa Petir. Tersedianya system aplikasi kependudukan BIMA sangat membantu aparat Desa Petir dalam melakukan pembaharuan data dan membantu pelaksanaan birokrasi Desa Petir secara cepat dan akurat.

Kata kunci : Pendataan, system informasi, data penduduk, BIMA.

**ABSTRACT**

Population data is one of the foundations of the successful implementation of government programs. To ensure the establishment of good population information system should be supported by accurate population data base, availability of infrastructure renewal effective and efficient data, human resources and the availability of adequate personnel allocations are feasible. Data collection activities in Petir village has managed to build a data base of population. Availability of the system of residence applications (BIMA) is helpful in conducting apparatus Petir Village renewal data and assist the implementation of village bureaucracy quickly and accurately.

Keywords : Data collection, system information, population data, BIMA.

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam pendataan ini karena fungsinya sebagai ujung tombak pendataan. Meskipun mekanisme pendataan telah dibangun oleh Departemen Dalam Negeri, namun hal ini dirasakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah tidak adanya mekanisme operasional pada pendataan ini khususnya pada aspek pembaruan data. Aspek sumberdaya manusia yang terbatas pun menjadi masalah pada pendataan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun tanggung jawab pendataan ini ada di pemerintahan desa, namun pelaksana sesungguhnya adalah ketua RT yang di banyak wilayah memiliki tingkat pendidikan yang